

# MEREDAM GEGADUHAN IMPOR BERAS

**K**egaduhan keran impor beras di negeri ini kembali mencruat ke permukaan. Impor bukanlah barang haram yang tidak boleh dilakukan. Namun, hal itu harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti musim kemarau berkepanjangan, sehingga mengancam produksi pangan. Merujuk dari pemahaman ini, bagaimana dengan pemerintahan saat ini. Sudahkah impor beras yang dilakukan pemerintah akhir bulan ini benar-benar mendesak dilakukan?

Pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton untuk beras medium yang pasokannya sedang langka. Impor beras dijadwalkan tiba akhir Januari ini, berjumlah sekitar 500.000 ton. Beras impor kali ini berasal dari Vietnam dan Thailand.

Soal jadwal kedatangan beras impor, pemerintah beralasan bahwa pada akhir Januari diperkirakan akan terjadi kelangkaan pasokan beras karena panen

petani bakal terealisasi pada Februari dan Maret. Jadi beras impor tersebut sebagai cadangan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan pasokan beras.

Situasi yang demikian, semakin menyulut pemerintah khawatir Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tak mampu mengendalikan harga beras ketika terjadi lonjakan harga jika pasokan tidak ditambah. Impor bukanlah barang haram yang tidak boleh dilakukan. Namun, hal itu harus dilakukan dalam keadaan darurat, seperti musim kemarau berkepanjangan, sehingga mengancam produksi pangan.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan tidak ingin ambil risiko atas kelangkaan pasokan beras yang bisa mengganggu ketersediaan beras. Sebab ujung-ujungnya bisa mendorong kenaikan harga beras yang akan merugikan masyarakat, (Kompas, 16/1).

Hal senadapun diungkapkan

oleh Presiden Joko Widodo mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengamankan dan menguatkan cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog. Kecukupan cadangan beras tetap lancar sehingga agar tidak melonjak.

Memang sudah menjadi tugas negaralah untuk menjaga rakyatnya jangan sampai kelaparan. Tetapi, jangan hanya karena nafsu mengumpulkan dana untuk kepentingan politik, semua aturan ditabrak. Petani yang sudah miskin semakin tidak berdaya karena banyaknya pangan impor. Jadi beras impor hanya berfungsi sebagai cadangan yang dapat dimanfaatkan pada saat pasokan langka dan harga naik.

Mengacu pada data yang dirilis Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization /FAO), harga beras rata-rata Indonesia sebesar USD 1/kg berbanding dengan harga beras rata-rata internasional yang sekitar USD 0,4/kg. Untuk kawasan Asia Tenggara, harga beras di Kamboja sekitar USD 0,42/kg, di Thailand USD 0,33/kg, di Vietnam USD 0,31/kg pada 2016 lalu. Data itu me-



Oleh

**Novi Puji Lestari**

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

mang dirilis dua tahun lalu, tetapi dipastikan belum terjadi pergeseran secara signifikan.

Masih berdasarkan publikasi FAO, mahalnya harga beras di Indonesia bila dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara adalah karena ongkos produksi padi yang tinggi dan diperparah tingginya margin dalam tata niaga beras selama ini. Bahkan persoalan tata niaga beras yang tidak

efisien itu kabarnya menjadi sumber dominan yang membuat harga beras mahal.

## Solusi kegaduhan impor beras

Menengok situasi yang demikian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menunjuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana impor. Perusahaan pelat merah yang mendapat tugas tersebut adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Namun, pertanyaannya, kenapa setiap pemerintah mengimpor beras selalu menimbulkan kegaduhan? Setidaknya ada beberapa penyebab mengapa impor beras seringkali menimbulkan kegaduhan.

Pertama, tidak transparannya pemerintah. Seperti kita baca di media massa dan saksikan di televisi, pejabat terkait selalu mengatakan, pemerintah tidak akan mengimpor beras. Pemerintah tidak akan mengimpor beras karena persediaan (stok) di Bulog cukup. Kalaupun persediaan kurang akan bisa ditutupi oleh panen yang sebentar lagi tiba. Pernyataan ini jelas-jelas diragukan. Tandanya sudah jelas.

Kedua, meski yang diim-

por jenis beras medium, tapi senyatanya harga beras khususnya untuk jenis medium ini rupanya terus naik. Obat yang biasanya 'mujarab' untuk mengatasi hal ini yaitu operasi pasar sudah dilakukan. Namun hasilnya, nihil. Harga beras terus naik dan tidak bisa dikendalikan. Obat 'mujarab' lain, datangnya panen, tidak bisa diharapkan hasilnya. Panen pasti tiba. Tapi hasilnya tidak bisa diharapkan memberikan hasil yang maksimal terutama karena faktor lain. Seperti diketahui sejumlah sentra penghasil beras mengalami cuaca buruk. Hasilnya bisa dipastikan, tidak maksimal.

Ketiga, terlepas dari kebijakan impor beras dan harga beras yang belakangan ini terus melonjak, yang menarik dicermati adalah harga beras di Indonesia relatif lebih mahal daripada sesama negara produsen beras di kawasan Asia Tenggara, bahkan harga beras Indonesia juga lebih mahal daripada harga beras internasional secara rata-rata.

Herannya, meski tanda-tanda tersebut sudah jelas terlihat, namun pihak terkait tetap pada keyakinannya. Tidak perlu impor beras. Sayangnya keyakinan

ini tidak didukung dengan realita di lapangan. Akhir dengan terpaksa pemerintah menyatakan akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton yang akan tiba akhir Januari ini. Beras akan didatangkan dari negara tetangga Thailand dan Vietnam serta dari Pakistan.

Keempat, actor yang akan melakukan impor beras. Persoal ini juga menjadi penyebab terjadinya kegaduhan dalam impor beras. Seperti diketahui impor beras di negara kita selalu menimbulkan masalah.

Insyallah melalui keempath langkah-langkah tersebut, atas, ketika kita bisa konsisten dilakukan oleh pemerintah masalah gejolak impor yang sedang terjadi saat ini bisa redam. Memang impor bukanlah barang haram yang tidak boleh dilakukan.

Namun, hal itu harus dilakukan dalam keadaan darurat seperti musim kemarau berkepanjangan, sehingga mengancam produksi pangan. Menjaga tugas negaralah untuk menjaga rakyatnya jangan sampai laparan. Tetapi, jangan har karena nafsu mengumpulkan dana untuk kepentingan politik semua aturan ditabrak. (\*)

Kirim opini Anda ke email [redaksi@malang-post.com](mailto:redaksi@malang-post.com)

Panjang Tulisan 850 kata dan jangan lupa sertakan foto diri.